

PELINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG ANTARA KONSUMEN DENGAN PERUSAHAAN JASA EKSPEDISI PT POS INDONESIA CABANG PATI

Oleh:

Olga Alya Intan Aristin¹, Ari Hernawan,²

INTISARI

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian isi perjanjian antara konsumen dan perusahaan jasa ekspedisi pengiriman barang PT Pos Indonesia Cabang Pati dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Penelitian ini juga bertujuan mengetahui dan menganalisis pelindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam hal terjadi wanprestasi pada perjanjian pengiriman barang oleh perusahaan jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Cabang Pati.

Penulisan hukum ini menggunakan metode normatif-empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan alat pedoman studi dokumen. Penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara terhadap subjek penelitian dengan alat berupa pedoman wawancara yang bersifat terbuka. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, isi perjanjian pengiriman barang antara konsumen dan perusahaan jasa ekspedisi PT Pos Indonesia Cabang Pati tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, pelindungan hukum internal dan eksternal belum melindungi kepentingan dari konsumen. Pelindungan hukum internal yang diberikan hanya tertulis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), Surat Edaran PT Pos Indonesia Cabang Pati, dan Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia Cabang Pati. Konsumen tidak dapat mengakses secara bebas peraturan yang dibuat oleh PT Pos Indonesia Cabang Pati. Pelindungan hukum eksternal kurang melindungi kedudukan konsumen karena terdapat kejadian wanprestasi yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai barang salah kirim.

Kata Kunci : Pelindungan Hukum, Perjanjian, Pengiriman Barang, Klausula Eksonerasi, Konsumen, Wanprestasi , Jasa Ekspedisi.

¹ Mahasiswa Departemen Hukum Perdata, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2019, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

² Dosen Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

**LEGAL PROTECTION OF DELIVERY OF GOODS AGREEMENTS
BETWEEN CUSTOMERS AND EXPEDITION SERVICE
COMPANIES PT POS INDONESIA PATI BRANCH**

By:

Olga Alya Intan Aristin³, Ari Hernawan⁴

ABSTRACT

This legal writing aims to determine and analyze the suitability of the agreement's contents between the consumer and the freight forwarding service company PT Pos Indonesia Pati Branch with provisions in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research also aims to determine and analyze the legal protection provided to consumers in case of a breach of contract on the delivery of goods by the shipping service company PT Pos Indonesia Pati Branch.

This research is categorized as normative-empirical research. Normative research is carried out by examining library materials to obtain secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials using document study guidelines. Empirical research was conducted using field research to obtain primary data through interviews with research subjects using open interview guidelines. The research data were analyzed qualitatively and presented descriptively.

Based on the results of research and discussion, there are two conclusions can be drawn based on the research and discussion results. First, the contents of the goods delivery agreement between the consumer and the shipping service company PT Pos Indonesia Pati Branch does not comply with the provisions in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Second, internal and external legal protection has not protected the interests of consumers. The internal legal protection provided is only written in the Standard Operating Procedures (SOP), Circular Letters PT Pos Indonesia Pati Branch, and Board of Directors Decrees PT Pos Indonesia Pati Branch. Consumers cannot freely access regulations made by PT Pos Indonesia Pati Branch. External legal protection does not protect the position of consumers because there are incidents of default that are not regulated in laws and regulations regarding wrongly sent goods.

Keywords: *Legal Protection, Agreements, Delivery of Goods, Exoneration Clause, Consumer, Breach of Contract, Expedition Services.*

³ Undergraduate Law Student of Civil Law Department, Degree Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Sleman, Special Region of Yogyakarta.

⁴ Lecture of Civil Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio No, 1 Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.